



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/1227/2022

TENTANG

PESERTA PENEMPATAN DOKTER SPESIALIS
DALAM RANGKA PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS
ANGKATAN KESEMBILAN BELAS TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pemenuhan kebutuhan dan peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan spesialistik, perlu dilakukan upaya pemerataan dokter spesialis di seluruh Indonesia;
- b. bahwa upaya pemerataan pelayanan kesehatan spesialistik dilakukan melalui penempatan peserta dokter spesialis dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Peserta Penempatan Dokter Spesialis Dalam Rangka Pendayagunaan Dokter Spesialis Angkatan Kesembilan Belas Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 705);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1121);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/174/2020 tentang Penambahan Jenis Spesialisasi Dalam Rangka Pendayagunaan Dokter Spesialis;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PESERTA PENEMPATAN DOKTER SPESIALIS DALAM RANGKA PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS ANGKATAN KESEMBILAN BELAS TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan peserta penempatan dokter spesialis dalam rangka pendayagunaan dokter spesialis angkatan kesembilan belas tahun 2022 yang selanjutnya disebut Peserta sesuai dengan daftar nama dan lokasi penempatan Peserta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas dokter spesialis obstetri dan ginekologi, spesialis anak, spesialis penyakit dalam, spesialis bedah, spesialis anestesi dan terapi intensif, dan spesialis patologi klinik.

KETIGA : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
a. penerima bantuan biaya pendidikan secara langsung; dan
b. penerima bantuan biaya pendidikan secara tidak langsung.

KEEMPAT : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA berstatus ASN dan nonASN.

KELIMA : Jangka waktu penempatan Peserta penerima bantuan biaya pendidikan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KETIGA huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEENAM : Jangka waktu penempatan Peserta penerima bantuan biaya pendidikan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b dengan status ASN sesuai dengan ketentuan instansi asal masing-masing.
- KETUJUHUH : Jangka waktu penempatan Peserta penerima bantuan biaya pendidikan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b dengan status nonASN selama 12 (dua belas) bulan.
- KEDELAPAN : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1227/2022
TENTANG
PESERTA PENEMPATAN DOKTER SPESIALIS
DALAM RANGKA PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS
ANGKATAN KESEMBILAN BELAS TAHUN 2022

DAFTAR NAMA DAN LOKASI PENEMPATAN PESERTA PENEMPATAN DOKTER
SPESIALIS DALAM RANGKA PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS
ANGKATAN KESEMBILAN BELAS TAHUN 2022

A. Peserta Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Secara Langsung

| No | Nama | Rumah Sakit | Kabupaten/ Kota | Provinsi | Lama Penugasan |
|----|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|---|
| 1 | dr. Heri Farnas, Sp. OG | RSUD dr. Tengku Mansyur | Kota Tanjung Balai | Sumatera Utara | Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan |
| 2 | dr. Rudi Haris Munanda, Sp.B | RSUD Petala Bumi | Kota Pekanbaru | Riau | Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan |
| 3 | dr. Wildan Riswanto, Sp.PK | RSUD Tais | Seluma | Bengkulu | Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan |
| 4 | dr. Nadia Kusumayanti, Sp.PD | RSUD Depok | Kota Depok | Jawa Barat | Disesuaikan dengan ketentuan peraturan |

| No | Nama | Rumah Sakit | Kabupaten/ Kota | Provinsi | Lama Penugasan |
|----|-----------------------------------|--|--------------------|---------------------|---|
| | | | | | perundang- undangan |
| 5 | dr. Arieff Kustiandi, Sp.OG | Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran | Pangandaran | Jawa Barat | Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan |
| 6 | dr. Yoga Paripurna, Sp.OG | RSUD Kelet | Jepara | Jawa Tengah | Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan |
| 7 | dr. Ika Ridlawati, Sp.PK | RSUD dr. Soedarso | Kota Pontianak | Kalimantan Barat | Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan |
| 8 | dr. Ricko Sadli Sujana, Sp.B | RSUD Kabupaten Sekadau | Sekadau | Kalimantan Barat | Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan |
| 9 | dr. Ranisa Handayani, Sp.PK | Pemerintah Daerah Kota Balikpapan | Kota Balikpapan | Kalimantan Timur | Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan |
| 10 | dr. Leny Suardi, Sp.OG | Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung | Tana Tidung | Kalimantan Utara | Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan |

| No | Nama | Rumah Sakit | Kabupaten/ Kota | Provinsi | Lama Penugasan |
|----|--|---|--|--|---|
| 11 | dr. Ardiansyah Siradjuddin, Sp.An | RSUD Haji Makassar | Kota Makassar | Sulawesi Selatan | Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan |
| 12 | dr. Putri Hidayasyah Purnama Lestari, Sp.PK | RSUD Kabupaten Buton | Buton | Sulawesi Tenggara | Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan |
| 13 | dr. Maria Ida Rettobyaan, Sp.B | Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara | Maluku Tenggara | Maluku | Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan |
| 14 | dr. Hery Siswanto, Sp.B | RSUD Masohi | Maluku Tengah | Maluku | Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan |
| 15 | dr. Ratna Delima Hutapea, Sp.PK | RSUD Abepura | Kota Jayapura | Papua | Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan |
| 16 | dr. Zuhriah Novianty, Sp.PK | Kementerian Pertahanan Republik Indonesia | Kementerian Pertahanan Republik Indonesia | Kementerian Pertahanan Republik Indonesia | Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan |

B. Peserta Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Secara Tidak Langsung yang Berstatus ASN

| No | Nama | Rumah Sakit | Kabupaten/ Kota | Provinsi | Lama Penugasan |
|----|--------------------------------------|--|----------------------|---------------------|---|
| 1 | dr. Bobby Hartanto, Sp. OG | Pemerintah Daerah Kabupaten Siak | Siak | Riau | Sesuai dengan ketentuan instansi asal |
| 2 | dr. Henny Fauziah, Sp. PK | Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar | Kota Makassar | Sulawesi Selatan | Sesuai dengan ketentuan instansi asal |
| 3 | dr. Claudia Collins Loho, Sp. B | RSUD Kotamobagu | Kota Kotamobagu | Sulawesi Utara | Sesuai dengan ketentuan instansi asal |
| 4 | dr. Feldy Deki, Sp. B | RSUD Trihora Salakan | Banggai Kepulauan | Sulawesi Tengah | Sesuai dengan ketentuan instansi asal |
| 5 | dr. Julcrithno Irawanputra, Sp. B | RSUD Provinsi Sulawesi Barat | Mamuju | Sulawesi Barat | Sesuai dengan ketentuan instansi asal |

C. Peserta Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Secara Tidak Langsung yang Berstatus nonASN

| No | Nama | Rumah Sakit | Kabupaten/ Kota | Provinsi | Lama Penugasan |
|----|---|-------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | dr. Defarendy Sulaiman, Sp.OG | RSUD Tapan | Pesisir Selatan | Sumatera Barat | 12 bulan |
| 2 | dr. Muhammad Faruk, Sp.B | RSUD Raja Musa | Indragiri Hilir | Riau | 12 bulan |
| 3 | dr. Wardy Susanto Marpaung, Sp.OG | RSUD Tais | Seluma | Bengkulu | 12 bulan |
| 4 | dr. Mirzah Tindar Fathimah, Sp.OG | RSU Liwa | Lampung Barat | Lampung | 12 bulan |
| 5 | dr. Ayu Anissa Bahri, Sp.OG | RSUD Natuna | Natuna | Kepulauan Riau | 12 bulan |
| 6 | dr. Saddam Husein Damanik, Sp.B | RSUD Encik Mariyam | Lingga | Kepulauan Riau | 12 bulan |
| 7 | dr. Apdhika Kristian Trisanto, Sp.OG | RSUD Linggajati Kuningan | Kuningan | Jawa Barat | 12 bulan |
| 8 | dr. Meilyna Sulphiana Alam, Sp.B | RSUD Umar Mas'ud | Gresik | Jawa Timur | 12 bulan |
| 9 | dr. Bayu Priangga, Sp.OG | RSUD Besuki Situbondo | Situbondo | Jawa Timur | 12 bulan |
| 10 | dr. Jacquels Mozes Tolanda, Sp.B | RSU Sumbawa Besar | Sumbawa | Nusa Tenggara Barat | 12 bulan |
| 11 | dr. Mohammad Angitya Satria Hutama, Sp.OG | RSUD Awet Muda Narmada | Lombok Barat | Nusa Tenggara Barat | 12 bulan |
| 12 | dr. Ni Made Reditya Noviyani, Sp.A | RSUD Awet Muda Narmada | Lombok Barat | Nusa Tenggara Barat | 12 bulan |
| 13 | dr. Todung Antony Wesliaprius, Sp.OG | RS Penyangga Perbatasan Betun | Malaka | Nusa Tenggara Timur | 12 bulan |

| No | Nama | Rumah Sakit | Kabupaten/ Kota | Provinsi | Lama Penugasan |
|----|--|--|--------------------|----------------------|-------------------|
| 14 | dr. Rina Lizza Roostati, Sp.An | RSUD Sultan Muhammad Jamaludin 1 | Kayong Utara | Kalimantan Barat | 12 bulan |
| 15 | dr. Andi Emier Hidayat Arsan, Sp.An | RSU Pemangkat | Sambas | Kalimantan Barat | 12 bulan |
| 16 | dr. Putra Kurnia Nugraha, Sp.An | RSUD Malinau | Malinau | Kalimantan Utara | 12 bulan |
| 17 | dr. Indah Fitria, Sp.PD | RSUD Malinau | Malinau | Kalimantan Utara | 12 bulan |
| 18 | dr. Danu Prasetyo Irawan Winoto, Sp.An | RSU Ampana | Tojo Una- Una | Sulawesi Tengah | 12 bulan |
| 19 | dr. Irfan Faisal, Sp.An | RSUD Kabupaten Buton Tengah | Buton Tengah | Sulawesi Tenggara | 12 bulan |
| 20 | dr. Felicia Angela Kanzil, Sp.A | RSUD Tombulilato | Bone Bolango | Gorontalo | 12 bulan |

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003